

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki akal pikiran yang digunakan untuk mengatur kehidupannya. Setiap manusia memiliki kepentingan dan keinginan serta dituntut untuk tetap bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lainnya, agar tetap bisa hidup dan mencapai keinginannya, sehingga terbentuk suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat yang hidup bersama dan bermukim pada suatu wilayah secara alami memiliki kebiasaan yang disebut dengan kebudayaan. Dari kebiasaan masyarakat, secara tidak langsung terbentuklah suatu sistem aturan yang disebut dengan adat.

Demi mempertahankan segala bentuk kebudayaan dan adat, masyarakat dituntut untuk terus melastarikan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang suatu masyarakat tersebut. Adat dan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu memiliki nilai-nilai kehidupan yang akan tetap hidup sampai saat sekarang ini bahkan sampai masa mendatang. Untuk menghormati semua nilai yang tertanam dalam kehidupan, masyarakat tertentu akan melestarikan kebudayaan dengan mempertahankan cagar budaya agar nilai dari kebudayaan adat tertentu tetap ada pada masyarakat itu sendiri.

Artefak merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, serta juga karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang bisa untuk diraba, dilihat, serta juga didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. didalam kenyataan kehidupan

bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak dapat dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud dari kebudayaan ideal mengatur serta juga memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan juga karya (artefak) manusia.

Artefak didalam arkeologi mengandung pengertian benda (atau bahan alam) yang pasti dibuat dengan (tangan) manusia atau jelas menampakkan (observable) adanya jejak-jejak dari buatan manusia padanya (bukan benda alamiah semata) dengan melalui teknologi pengurangan ataupun juga teknologi penambahan pada benda alam tersebut. Ciri penting dalam konsep artefak ialah bahwa benda tersebut dapat bergerak atau juga dapat dipindahkan (movable) oleh tangan manusia dengan mudah (relatif) tanpa merusak atau juga menghancurkan bentuknya¹.

Peninggalan sejarah berupa artefak merupakan salah satu wujud kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam tatanan masyarakat. Artefak bisa menggambarkan kemajuan peradaban suatu bangsa dalam period sejarah tertentu yang memberikan informasi berkenan dengan masa lalu sebagai pedoman basis pengetahuan dalam berbagai aspek, termasuk aspek kebudayaan.

Begitu pula dengan masyarakat Minangkabau yang memiliki kebudayaan dan sistem adat sendiri. Masyarakat adat Minangkabau merupakan kelompok masyarakat nusantara yang berbahasa dan menjunjung tinggi adat Minangkabau.

¹ <https://pendidikan.co.id/pengertian-artefak-jenis-contoh-beserta-gambarnya/> diakses pada tanggal 20 juli 2020

Nenek moyang Minangkabau berasal dari Iskandar Zulkarnain yang semua sejarah ini dapat kita temukan pada tambo Minangkabau².

Tambo adalah salah satu bentuk karya sastra lama berbentuk prosa. Berasal dari bahasa sansakerta yaitu tambe atau tambay yang berarti bermula atau dapat dipahami sebagai asal usul peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan suatu daerah. Begitu juga dengan tambo Minangkabau yang menggambarkan sejarah Minangkabau yang memuat asal usul daerah, silsilah para raja, batas wilayah, hingga adat dan budaya. Pada mulanya tambo disampaikan secara lisan secara turun temurun dan baru ditulis setelah masyarakat mengenal tulisan. Tambo Minangkabau pertama kali dikenal dalam bentuk tulisan arab melayu, dan diterbitkan pada dalam bahasa latin pada awal abad ke-20³. Menurut tulisan-tulisan dan cerita para orang tua, tambo Minang yang asli, pada zaman kolonial Belanda, dipinjam dan tidak dikembalikan kepada pemilik asli (para tuan laras).

Tambo di Minangkabau secara garis besar dibagi menjadi dua bagian utama:⁴

1. Tambo alam, berisi asal usul nenek moyang dan kerajaan Minangkabau
2. Tambo adat, berisi tatanan adat, sistem pemerintahan dan undang-undang perjalanan pemerintahan di Minangkabau

Tambo menggambarkan sejarah, belum bisa disamakan dengan ilmu pengetahuan. Karena pada dasarnya tambo adalah karya sastra yang berasal dari warisan lisan nenek moyang⁵.

²<https://www.gurupendidikan.co.id/suku-minangkabau/> ditulis oleh Bitar, diakses pada tanggal 21 juli 2020.

³<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tambo-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 21 juli 2020.

⁴A.A. Navis, (1984), Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: PT. Grafiti Pers.

Tambo merupakan warisan nenek moyang sangat kaya akan nilai budaya. Nilai dari tambo memang tidak akan pernah hilang dan selalu hidup dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sampai saat ini. Kitab tambo yang telah ditulis dan dibukukan menjadi suatu cagar dari budaya Minangkabau yang akan menjadi bukti sejarah warisan nenek moyang Minangkabau.

Tambo Minangkabau yang disimpan di Sumatera Barat terdapat di beberapa lembaga formal, Non formal dan masyarakat. Museum Adityawarman menyimpan sekitar 60 naskah. Disamping itu jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas Padang menyimpan sekitar 25 naskah, serta Balai Kajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional, Padang juga menyimpan beberapa naskah. Tambo tersebut tidak semuanya ada di daerah Minangkabau atau provinsi Sumatera Barat. Naskah tambo Minangkabau yang berhasil diketemukan sebanyak 47 naskah, masing-masing tersimpan di Museum Nasional Jakarta sebanyak 10 naskah, di perpustakaan Universitas Leiden sebanyak 31 naskah, di perpustakaan KITLV Leiden sebanyak 3 naskah, di perpustakaan SAOS Universitas London 1 naskah dan di perpustakaan RAS London 2 naskah⁶.

Hal ini tentu menjadi perhatian yang cukup serius mengingat kemajuan zaman yang mempengaruhi eksistensi adat, khususnya adat Minangkabau. Orang-orang tua yang masih hidup yang pernah mengalami kehidupan didalam “maso adat” tersebut, mungkin dapat memberikan keterangan yang nyata, tidak mungkin masih dapat dijumpai dewasa ini, bahkan ahli-ahli adat yang ada keterangannya simpang siur, sedangkan tambo serta kabar-kabar itu sendiri pun yang mudah kita jumpai hanya di museum Jakarta atau perpustakaan lain yang mempunyainya,

⁵<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tambo-dan-contohnya/> diakses pada tanggal 21 juli 2020

⁶<http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=96268&lokasi=lokal> diakses pada tanggal 21 juli 2020.

sehingga tidak salah lagi karena kurang perhatian didalam bidang ini orang menggambarkan sumber untuk mengetahui adat Minangkabau itu sebagai : *Guru mati Surek lah hilang* (guru meninggal dunia, catatan pun hilang).

Sangat tidak baik jika hasil pemikiran suatu masyarakat berupa peraturan adatnya tidak berada dimana masyarakat itu bermukim. Maka perlulah masyarakat asli memegang hasil karya masyarakat itu sendiri sebagai pegangan kehidupannya. Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah mengakui pentingnya nilai kekayaan intelektual yang ada dalam folklor Indonesia sejak pertama kali mereka mengatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang sekarang telah di sempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengaturan masyarakat hukum adat dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia adalah bentuk jaminan eksistensi terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dengan segala hak-haknya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan tegas menyebutkan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Deklarasi PBB yang ke-61 menjelaskan tentang hak-hak masyarakat adat pada pasal 13 ayat 1, bahwa masyarakat adat berhak untuk menghidupkan kembali, menggunakan, mengembangkan dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Baik sejarah, bahasa, tradisi lisan, sistem tulisan, filsafat, dan

literature mereka untuk mempersembahkan dan mempertahankan nama-nama kumunitas, nama-nama tempat-tempat dan nama-nama orang. Pada ayat 2 menjelaskan bahwa negara patut mengambil tindakan-tindakan efektif untuk menjamin bahwa hal ini dilindungi dan juga menjamin bahwa masyarakat adat dapat memahami dan dipahami dalam proses politik, hukum dan administratif, dimana dianggap perlu dengan menyediakan penerjemah atau dengan alat lain yang tepat guna

Deklarasi PBB yang ke-61 menjelaskan dukungan PBB terhadap etnis tertentu untuk dapat memiliki dan memegang tradisi lisan dan literatur mereka. Namun untuk resolusi ini, Indonesia sebagai tempat bermukim paling banyak etnis Minangkabau perlu memperhatikan serta meratifikasi resolusi tersebut sebagai upaya perlindungan dan mendukung pengembalian naskah-naskah tersebut, dan sangat bermanfaat bagi masyarakat minangkabau dewasa ini.

Oleh karena beberapa pembahasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang :“Perlindungan Hukum Terhadap Artefak Tambo Adat Minangkabau Berdasarkan *United Nations Declaration On The Right Of Indigenous Peoples* (Deklarasi PBB Tentang Hak Masyarakat Adat) dan Penerapannya di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas pada penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap artefak tambo adat Minangkabau berdasarkan *United Nations Declaration On The Right Of Indigenous Peoples* (Hak Masyarakat Hukum Adat)
2. Bagaimana kendala penerapan di Indonesia dalam perlindungan terhadap artefak tambo adat Minangkabau berdasarkan *United Nations*

Declaration On The Right Of Indigenous Peoples (Hak Masyarakat Hukum Adat)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan membahas perlindungan hukum terhadap artefak tambo adat Minangkabau berdasarkan *United Nations Declaration On The Right Of Indigenous Peoples* (Hak Masyarakat Hukum Adat)
2. Untuk mengetahui dan membahas kendala penerapan di Indonesia dalam perlindungan artefak tambo adat Minangkabau berdasarkan *United Nations Declaration On The Right Of Indigenous Peoples* (Hak Masyarakat Hukum Adat)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambahkan bahan kajian, serta kontribusi keilmuan pada civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta dapat memberikan pemahaman, dan pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Artefak Tambo Adat Minangkabau Berdasarkan *United Nations Declaration On The Right Of Indigenous Peoples* (Hak Masyarakat Hukum Adat) dan Penerapannya di Indonesia.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis, dalam pembuatan penelitian hukum. Agar dapat dipergunakan sebagai

reverensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah, serta dapat menambah literatur di beberapa perpustakaan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan Perlindungan Hukum Terhadap Artefak Tambo Adat Minangkabau Berdasarkan *United Nations Declaration On The Right Of Indigenous Peoples* (Hak Masyarakat Hukum Adat) dan kendala Penerapannya di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan dan mempelajari bahan – bahan pendukung lainnya dengan materi yang di bahas dalam penulisan ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :⁷

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) Pasal 18b Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelestarian Budaya Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- 5) Resolusi PBB yang ke-61 13 September Tahun 2007.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1986, hlm.51-52.

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode dalam penelitian hukum normatif.⁸ Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara ,membaca buku-buku, jurnal hukum internasional, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a. Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika), Tahun 2002, hlm. 50.

Dalam pengumpulan sumber data empiris penulis mengorganisasikan data (hasil kerja pengamatan/pengukuran), untuk mengetahui ada tidaknya kenyataan-kenyataan semula diduga.⁹

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana upaya perlindungan artefak tambo adat Minangkabau ditinjau dari *united nations on the right of indigenous peoples*, penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data yang diperoleh dari penelitian yang disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

⁹ Ibid hlm 23